

PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK ANTONIO GRAMSCI TENTANG HEGEMONI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI NEGARA DENGAN MASYARAKAT SIPIL

Astrid Veranita Indah
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
Astrid.veranita@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Dominasi kelas penguasa dalam sistem politik modern tidak selalu berlangsung melalui kekerasan fisik, melainkan melalui mekanisme ideologis dan kultural yang lebih halus. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep hegemoni dalam kerangka filsafat politik Antonio Gramsci, mendeskripsikan konstruksi relasi antara negara (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*), serta mengidentifikasi implikasinya terhadap relasi struktural keduanya dalam konteks politik kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-analitis melalui analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber primer karya Gramsci dan sumber sekunder jurnal bereputasi tahun 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hegemoni Gramsci beroperasi melalui dialektika *consent* dan *coercion*, diperkuat oleh *historic bloc* dan peran intelektual organik dalam mereproduksi ideologi dominan. Negara dipahami sebagai *stato integrale*, yakni kesatuan dialektis antara *political society* dan *civil society* yang batas-batasnya bersifat cair. *Civil society* sekaligus berfungsi sebagai arena reproduksi hegemoni dan ruang potensial bagi gerakan kontra-hegemoni melalui strategi *war of position*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Gramsci mendekonstruksi dikotomi liberal negara-masyarakat sipil dan membuka agenda emansipatoris bagi demokratisasi substansial. Disarankan penguatan *critical consciousness* melalui pendidikan transformatif dan pembangunan *historic bloc* alternatif sebagai kekuatan kontra-hegemonik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Filsafat Politik, Antonio Gramsci, Masyarakat Sipil

Abstract

The domination of the ruling class in modern political systems does not always occur through physical coercion, but rather through subtler ideological and cultural mechanisms. This study aims to analyze the concept of hegemony within Antonio Gramsci's political philosophy, describe the construction of the relationship between the state (political society) and civil society, and identify its implications for their structural relationship in contemporary political contexts. The method employed is library research with a qualitative-analytical approach through content analysis of Gramsci's primary works and reputable secondary journals published between 2021 and 2025. The findings reveal that Gramscian hegemony operates through the dialectic of consent and coercion, reinforced by the historic bloc and the role of organic intellectuals in reproducing dominant ideology. The state is conceived as stato

integrale, a dialectical unity between political society and civil society whose boundaries remain fluid and mutually permeable. Civil society simultaneously functions as an arena for hegemonic reproduction and a potential space for counter-hegemonic movements through the strategy of war of position. This study concludes that Gramsci's thought deconstructs the liberal dichotomy between state and civil society, opening an emancipatory agenda for substantive democratization. It is recommended that critical consciousness be strengthened through transformative education and the construction of an alternative historic bloc as a sustainable counter-hegemonic force.

Keywords: Political Philosophy, Antonio Gramsci, Civil Society

PENDAHULUAN

Kajian mengenai relasi antara negara dan masyarakat sipil dalam bingkai filsafat politik terus mengalami perkembangan yang dinamis, terutama di tengah meningkatnya kesadaran akademis terhadap mekanisme kekuasaan yang tidak lagi semata-mata bertumpu pada instrumen pemaksaan fisik, melainkan pada operasi ideologi dan pembentukan konsensus secara kultural. Dalam konteks tersebut, pemikiran Antonio Gramsci—seorang intelektual dan aktivis Marxis asal Italia yang menuangkan gagasan-gagasannya dalam *Prison Notebooks*—menjadi salah satu kerangka teoretis paling berpengaruh dalam ilmu politik dan sosiologi kontemporer. Gramsci memperkenalkan konsep *hegemony* sebagai mekanisme dominasi yang berlangsung bukan melalui kekerasan negara secara langsung, melainkan melalui pengorganisasian konsensus di ranah *civil society* sehingga kelas yang dikuasai secara sukarela menerima nilai-nilai dan pandangan dunia kelas yang mendominasi. Relevansi gagasan ini tampak semakin nyata dalam berbagai konteks politik kontemporer, terutama di negara-negara demokrasi yang tengah mengalami tekanan otoritarianisme, penyempitan ruang sipil, dan redefinisi ulang atas batas-batas antara negara dengan masyarakat.¹

Secara empiris, berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *hegemony* Gramscian terus beroperasi dalam berbagai dimensi kehidupan sosial-politik. Koch mengungkapkan bahwa teori relasi negara-masyarakat sipil Gramsci tetap menjadi kerangka analitis yang relevan untuk memahami bagaimana negara mempertahankan dominasi melalui

¹ Ali Ikhwani and Sri Wardani, "Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 4 (May 15, 2022): hlm.33-46, <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.406>.

kombinasi koersi dan konsensus, serta membuka ruang bagi gerakan kontra-hegemonik.² Moyo dalam kajiannya tentang Zimbabwe menegaskan bahwa *civil society* berfungsi sebagai arena perebutan *hegemony*, sekaligus sebagai infrastruktur tempat kelompok-kelompok alternatif membangun kepemimpinan moral dan intelektual.³ Di tingkat nasional, Ikhwan dan Wardani mendokumentasikan bagaimana masyarakat sipil Indonesia memanfaatkan platform digital sebagai arena perlawanan terhadap hegemoni negara, menunjukkan bahwa dialektika antara *political society* dan *civil society* dalam kerangka Gramscian tetap relevan di era digital.⁴ Temuan-temuan ini menggarisbawahi bahwa gagasan Gramsci bukan sekadar warisan intelektual historis, melainkan instrumen analitis yang terus hidup dan produktif dalam membaca dinamika kekuasaan kontemporer.⁵

Meski demikian, terdapat kesenjangan (*gap*) mencolok dalam literatur yang ada. Pertama, sebagian besar kajian tentang hegemoni Gramsci di Indonesia masih terfragmentasi dalam pendekatan sastra dan kajian budaya, bukan pada ranah filsafat politik secara sistematis.⁶ Kedua, kajian yang menganalisis secara mendalam implikasi teoretis dari pemikiran filsafat politik Gramsci terhadap relasi struktural antara negara dan masyarakat sipil—khususnya dalam konteks bagaimana *hegemony* mengonstruksi dan merestrukturisasi batas antara *political society* dan *civil society*—masih sangat terbatas. Lin mencatat bahwa konsep *integral state* Gramsci memerlukan elaborasi lebih lanjut, terutama berkenaan dengan kondisi pasca-krisis di mana keseimbangan antara *momentum integral* dan *tendensi totaliter* dalam relasi negara-masyarakat sipil menjadi sangat rentan.⁷ Ketiga, kajian studi pustaka yang berupaya mensintesis secara komprehensif dimensi-dimensi filsafat politik Gramsci—mulai dari anatomi *hegemony*, konsep *negara integral*, peran *intelektual organik*, hingga strategi *perang posisi* (*war of position*)—dan menghubungkannya secara sistematis dengan implikasi normatif terhadap relasi negara-masyarakat sipil, belum banyak dilakukan secara mendalam di konteks akademik Indonesia.

² Max Koch, “State-Civil Society Relations in Gramsci, Poulantzas and Bourdieu: Strategic Implications for the Degrowth Movement,” *Ecological Economics* 193 (2022): hlm.107275, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107275>.

³ Zenzo Moyo, *Civil Society and the Party-State in Zimbabwe: Democracy, Hegemonies and Polarities*, 2024, <https://doi.org/10.1007/978-981-97-5254-6>.

⁴ Ikhwan and Wardani, “Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo.”

⁵ Fais Dani and Suseno Suseno, “Hegemoni Gramsci Dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari,” *Jurnal Sastra Indonesia* 12 (July 23, 2023): hlm.127-137, <https://doi.org/10.15294/jsi.v12i2.70403>.

⁶ Ilham Pangestu, Suparmin, and Titik Sudiatami, “Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel 86 Karya Okky Madasari,” *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 19 (December 4, 2025): hlm.261-279, <https://doi.org/10.25134/q2zgb263>.

⁷ Yue Zhou Lin, “Gramsci, the Relativity of the Integral State-Society, and the COVID-19 Interregnum,” *Critical Sociology* 49, no. 3 (May 1, 2023): hlm.415-435, <https://doi.org/10.1177/08969205221086490>.

Novelty penelitian ini terletak pada upaya menyajikan sintesis kritis dan komprehensif atas pemikiran filsafat politik Gramsci secara utuh, tidak sekadar mengambil satu konsep parsial, melainkan menelusuri keterkaitan antarkonsep secara organis—*hegemony*, *masyarakat sipil*, *negara integral*, *intelektual organik*, dan *kontra-hegemoni*—untuk kemudian dianalisis implikasinya terhadap konstruksi relasi negara dengan masyarakat sipil. Pendekatan studi pustaka analitis-filosofis yang dipilih memungkinkan pengkajian yang mendalam atas sumber-sumber primer dan sekunder Gramscian, sekaligus menempatkan pemikiran tersebut dalam dialog kritis dengan perkembangan teori politik kontemporer. Sardar mengemukakan bahwa hegemoni Gramsci tidak hanya relevan untuk memahami dominasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi transformasi sosial melalui pembangunan kesadaran kritis di ranah *civil society*, sebuah implikasi yang menentukan bagi teori dan praktik demokrasi.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian berikut : (1) Bagaimana Gramsci merumuskan konsep *hegemony* dalam kerangka filsafat politiknya? (2) Bagaimana konstruksi relasi antara negara (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*) menurut perspektif Gramsci? (3) Apa implikasi pemikiran filsafat politik Gramsci tentang *hegemony* terhadap relasi negara dengan masyarakat sipil?. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep *hegemony* dalam kerangka filsafat politik Antonio Gramsci secara mendalam dan komprehensif; (2) mendeskripsikan konstruksi relasi antara negara dan masyarakat sipil dalam perspektif Gramscian; (3) mengidentifikasi dan menganalisis implikasi pemikiran Gramsci terhadap relasi struktural negara dengan masyarakat sipil dalam konteks politik kontemporer. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah filsafat politik, khususnya dalam upaya memahami mekanisme kekuasaan non-koersif yang bekerja melalui ranah ideologi dan budaya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, aktivis masyarakat sipil, dan pengambil kebijakan dalam memahami dinamika relasi antara negara dan warga dalam sistem demokrasi, serta dalam merancang strategi pemberdayaan masyarakat sipil sebagai kekuatan *kontra-hegemoni* yang produktif dan demokratis.

METODE PENELITIAN

⁸ Nayandeep Sardar, "Understanding Hegemony : A Critical Analysis through the Lens of Antonio Gramsci," *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 6, no. 2 (2024): hlm.1-6, <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.15796>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu metode penelitian yang secara sistematis mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan tertulis dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik yang diteliti, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat filosofis-analitis, bertujuan menelaah, memahami, dan mensintesis gagasan-gagasan teoretis Antonio Gramsci tentang *hegemony* dan implikasinya terhadap relasi negara dengan masyarakat sipil (*civil society*). Sebagaimana ditegaskan oleh Adlini et al., penelitian kualitatif studi pustaka dilakukan dengan desain penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, melainkan bertujuan mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual melalui penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan secara kritis dan mendalam.⁹

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya orisinal Antonio Gramsci, terutama *Selections from the Prison Notebooks*, serta terjemahan dan anotasi ilmiah atas karya tersebut. Sumber sekunder terdiri atas jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, serta artikel ilmiah yang terbit pada rentang tahun 2021 hingga 2025 dan berkaitan langsung dengan topik *hegemony* Gramscian, filsafat politik, serta relasi negara-masyarakat sipil. Penelusuran pustaka dilakukan menggunakan basis data daring seperti Google Scholar, Scopus, dan GARUDA (Garba Rujukan Digital), dengan menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia antara lain: "hegemoni Gramsci", "filsafat politik Gramsci", "masyarakat sipil dan negara", "relasi negara masyarakat sipil", "kontra-hegemoni", "intelektual organik Gramsci"; serta kata kunci dalam bahasa Inggris: "*Gramscian hegemony*", "*civil society and state*", "*political philosophy Gramsci*", "*counter-hegemony*", "*organic intellectuals*", "*integral state*", dan "*political society*".

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan dokumentasi sumber pustaka yang relevan secara tematis dan konseptual dengan masalah penelitian. Jaya, Warsah, dan Istan menjelaskan bahwa dalam penelitian kepustakaan, proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan mendokumentasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik bahasan, yang kemudian disaring dan diorganisasikan dalam suatu kerangka teori yang koheren.¹⁰ Kriteria inklusi pustaka yang ditetapkan dalam penelitian ini

⁹ Miza Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (March 1, 2022): hlm.974-980, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

¹⁰ Guntur Jaya, Idi Warsah, and Muhammad Istan, "Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan," *Tik Ilmu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 7 (June 30, 2023): hlm.117, <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>.

mencakup: (a) relevansi tematik dengan konsep *hegemony*, filsafat politik, dan relasi negara-masyarakat sipil; (b) tahun terbit antara 2021–2025 untuk jurnal; dan (c) memiliki reputasi ilmiah yang terverifikasi (*peer-reviewed*). Seleksi ini dilakukan secara ketat guna menjamin kedalaman dan validitas argumen yang dibangun.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang bersifat deskriptif-interpretatif, yakni membaca teks secara cermat, mengidentifikasi konsep-konsep kunci, mengklasifikasikan gagasan berdasarkan tema-tema analitis yang telah ditetapkan, kemudian menginterpretasikan makna dan implikasi teoretisnya secara reflektif. Zed menegaskan bahwa pemahaman sumber dalam penelitian kepustakaan harus dilakukan secara mendalam dan kritis melalui pengambilan catatan, penyusunan ringkasan, dan parafrasa, yang selanjutnya digunakan untuk mengembangkan hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian.¹¹ Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber, yakni dengan melakukan perbandingan dan pengecekan silang (*cross-checking*) antara berbagai sumber pustaka yang digunakan, sehingga interpretasi yang dihasilkan bersifat konsisten, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

PEMBAHASAN

A. Konsep Hegemoni dalam Kerangka Filsafat Politik Antonio Gramsci

Antonio Gramsci merupakan salah satu pemikir paling orisinal dalam tradisi filsafat politik abad ke-20 yang lahir dari pergulatan intelektual sekaligus perjuangan politik yang panjang. Pemikirannya tidak muncul dalam ruang kosong, melainkan tumbuh dari kritik tajam terhadap Marxisme klasik yang dianggap terlalu ekonomistis dan deterministik dalam memahami struktur kekuasaan masyarakat. Bagi Gramsci, pendekatan Marxisme ortodoks yang menempatkan ekonomi sebagai satu-satunya penentu perubahan sosial adalah reduksionistis dan tidak mampu menjelaskan mengapa kelas pekerja tetap tunduk pada dominasi kelas borjuis meski secara material kondisi mereka sangat tertindas. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu kajian, "bagi Marx dan Gramsci, masyarakat sipil adalah faktor kunci untuk memahami perkembangan kapitalis, tapi oleh Marx ia dipahami sebagai struktur (hubungan-hubungan produksi)" sementara "Gramsci melihat itu sebagai superstruktur yang

¹¹ M Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan," in *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, 2022, 94, <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>.

mewakili faktor aktif dan positif dari perkembangan sejarah".¹² Perbedaan mendasar inilah yang menjadi titik tolak Gramsci dalam membangun kerangka analisisnya sendiri yang jauh melampaui determinisme ekonomi kaum Marxis ortodoks.

Pembentukan pemikiran Gramsci tidak terlepas dari dua pengaruh besar, yakni filsuf idealis Italia Benedetto Croce dan pemimpin revolusioner Rusia Vladimir Lenin. Dari Croce, Gramsci menyerap pentingnya dimensi kultural dan intelektual dalam kehidupan sosial, sementara dari Lenin ia mengadopsi konsep hegemoni sebagai instrumen politik. Namun Gramsci melakukan transformasi konseptual yang fundamental: hegemoni tidak lagi sekadar berarti dominasi politik koersif sebagaimana dipahami Lenin, melainkan bertransformasi menjadi *intellectual and moral leadership* yang bekerja melalui konsensus dan pembentukan *common sense* dalam masyarakat. Gramsci menegaskan bahwa "*supremacy of a social group manifests itself in two ways, as domination and as intellectual and moral leadership*".¹³ Mekanisme inilah yang membuat dominasi kelas penguasa tidak perlu selalu menggunakan kekerasan fisik, karena masyarakat yang terhegemoni akan menerima dan menginternalisasi nilai-nilai kelas dominan sebagai kebenaran universal. Kondisi ini secara gamblang diperlihatkan dalam konteks kebijakan publik, di mana "kekuasaan dalam masyarakat dipertahankan melalui penguasaan ranah ideologis dan kultural oleh kelas dominan, yang menggunakan institusi-institusi seperti media, pendidikan, dan hukum untuk menyebarkan ideologi mereka sehingga diterima sebagai norma oleh masyarakat luas".¹⁴ Dengan demikian, genealogi konsep hegemoni Gramsci merepresentasikan sebuah lompatan epistemologis dari determinisme ekonomi menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kekuasaan bekerja secara kultural dan ideologis dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat.

B. Anatomi Hegemoni: Konsensus, Koersi, dan Blok Historis

Dalam kerangka filsafat politik Antonio Gramsci, kekuasaan hegemonik tidak bekerja melalui satu mekanisme tunggal, melainkan melalui dualisme dialektis antara *consent* (persetujuan) dan *coercion* (pemaksaan). Gramsci memandang bahwa dominasi kelas yang

¹² Nuzulul Intan Maulida, "Praktik Kekuasaan Dalam Novel Ri 1 Karya Salsadila Nurfazriah (Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 7 (2025): Hlm.37, <https://doi.org/10.62281/v3i7.2588>.

¹³ Panji Perdana Putra Priyanto, Ahmad Fatkhur Rohman, and Shinta Nurziana, "Hegemoni Kekuasaan Dalam Pagelaran Wayang Climen Lakon 'Semar Mbangun Kayangan' Oleh Ki Seno Nugroho Perspektif Antonio Gramsci," *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* 08, no. 02 (2026): hlm.431-441, <https://doi.org/10.30998/rq1e0v55>.

¹⁴ Gina Rahma et al., "Hegemoni Pemerintah Dalam Kebijakan Penghentian Izin Reklamasi Pantai Teluk Utara Jakarta Berdasarkan Teori Antonio Gramsci," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 2 (2024): hlm.7, <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.809>.

efektif dan berkelanjutan bergantung pada kemampuan kelas penguasa untuk membangun konsensus secara sukarela di ranah *civil society*, sekaligus mempertahankan kemampuan koersif melalui aparatus negara di ranah *political society*. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian hegemoni Gramsci, "Hegemoni merupakan bentuk kepemimpinan dan kekuasaan yang diperoleh melalui cara konsensus atau persetujuan".¹⁵ Persetujuan ini tidak muncul secara alamiah, melainkan diproduksi secara sistematis melalui institusi-institusi kultural, pendidikan, agama, dan media yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap tatanan sosial yang ada sebagai sesuatu yang wajar dan sah.

Namun konsensus semata tidak cukup untuk menopang hegemoni secara stabil. Gramsci memahami bahwa *coercion* tetap hadir sebagai cadangan kekuasaan yang diaktifkan ketika konsensus gagal. Dalam kerangka ini, Gramsci secara tegas membedakan dua ranah kekuasaan, di mana "Masyarakat politik merujuk pada negara beserta aparatus koersifnya, sementara masyarakat sipil mencakup institusi-institusi non-negara seperti pendidikan, agama, keluarga, dan media".¹⁶ Kedua ranah ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan beroperasi secara dialektis: konsensus memperkuat legitimasi kekuasaan di ranah *civil society*, sementara koersi menjadi instrumen pengaman negara ketika legitimasi tersebut dipersoalkan. Dialektika inilah yang menjadikan hegemoni sebagai mekanisme kekuasaan yang jauh lebih kompleks dan efektif dibandingkan dominasi fisik semata, karena "konsensus ini bekerja secara halus dan diterima secara sukarela, sehingga dominasi tidak lagi dirasakan sebagai paksaan terbuka".

Untuk memahami bagaimana dominasi kelas dapat berlangsung secara stabil dalam jangka panjang, Gramsci memperkenalkan konsep *blok historis* (*historic bloc*) sebagai "kesatuan antara struktur ekonomi, struktur politik, dan struktur ideologis yang menopang dominasi suatu kelas secara stabil".¹⁷ *Blok historis* berfungsi sebagai perekat antara basis material dan superstruktur ideologis-kultural, sehingga tatanan sosial diterima bahkan oleh kelompok yang secara objektif dirugikan olehnya. Dalam konteks ini, peran *intelektual organik* menjadi sangat sentral sebagai agen produksi dan penyebaran hegemoni, di mana "intelektual organik lahir dari kelompok subordinat dan berfungsi mengartikulasikan kepentingan

¹⁵ Ayu Tasyah Vaulita Rachman and Haris Supratno, "Perlawanan Kaum Intelektual Terhadap Kekuasaan Dalam Novel Kelomang Karya Qizink La Aziva: Kajian Hegemoni Gramsci," *Jurnal Sapala* 9, no. 2 (2022): hlm 56-67, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/47674>.

¹⁶ Muhammad Rizky Shorfana and Aswar, "Hegemoni Gramsci Dan Praktik Keagamaan Habaib Di Indonesia The Hegemony Of Gramsci And The Religious Practices Of The Habaib In Indonesia," *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. c (2025): hlm.328-341, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v6i2.358>.

¹⁷ Rifky Aldy Firmansyah and Titik Indarti, "Internalisasi Counter Hegemoni Dalam Novel Tutur Dedes Doa Dan Kutukan Karya Amalia Yunus (Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)," *BAPALA* 10, no. 1 (2023): hlm 59-70, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/53713>.

kolektifnya. Melalui peran ini, pengalaman sosial kelas bawah diolah menjadi kesadaran kritis dan diarahkan ke dalam *praksis sosial*". Dengan demikian, *blok historis* dan *intelektual organik* merupakan dua elemen struktural yang saling menopang dalam keberlangsungan hegemoni, sekaligus menjadi titik kritis di mana kemungkinan transformasi sosial dapat dinegosiasikan.

Tabel berikut menyajikan elemen-elemen anatomi hegemoni Gramsci secara sistematis untuk memperjelas perbedaan fungsi, mekanisme kerja, dan institusi yang terlibat dalam setiap elemen, sehingga memudahkan pemahaman tentang bagaimana hegemoni beroperasi secara komprehensif dalam masyarakat.

Tabel 1. Anatomi Hegemoni: Konsensus, Koersi, dan Blok Historis

Elemen Hegemoni	Definisi	Mekanisme Kerja	Institusi/Agen	Sifat
<i>Consent</i> (Konsensus)	Persetujuan sukarela masyarakat terhadap dominasi kelas penguasa	Internalisasi nilai-nilai kelas dominan sebagai common sense yang dianggap wajar dan alamiah	Sekolah, media massa, agama, keluarga	Halus, persuasif, tidak tampak sebagai paksaan
<i>Coercion</i> (Koersi)	Pemaksaan melalui aparat negara ketika konsensus gagal	Penerapan hukum, sanksi, dan kekerasan fisik secara terbuka maupun tersembunyi	Militer, polisi, pengadilan, birokrasi	Represif, terbuka, koersif
<i>Historic Bloc</i> (Blok Historis)	Kesatuan organis antara struktur ekonomi, politik, dan ideologi	Menyatukan basis material dan superstruktur agar dominasi kelas berlangsung stabil jangka panjang	Koalisi kelas penguasa, organic intellectuals, institusi negara	Struktural, dialektis, hegemonik
<i>Organic Intellectuals</i> (Intelektual Organik)	Agen produksi dan penyebaran ideologi yang lahir dari kelas tertentu	Mengartikulasikan kepentingan kelas, membangun narasi legitimasi atau counter-hegemony	Akademisi, jurnalis, tokoh agama, aktivis	Fungsional, ideologis, transformatif

<i>Intellectual & Moral Leadership</i>	Kepemimpinan melalui penguasaan ranah intelektual dan moral, bukan sekadar kekuatan fisik	Membangun legitimasi kultural agar dominasi diterima secara sukarela oleh kelompok subordinat	Elite kultural, institusi pendidikan, media	Kultural, normatif, hegemonik
--	---	---	---	-------------------------------

Sumber: Diolah dari Rachman & Supratno (2022, hlm. 57); Shorfana & Aswar (2025, hlm. 333); Priyanto, Rohman, dan Nurziana (2026, hlm. 436).

C. Konstruksi Relasi antara Negara (Political Society) dan Masyarakat Sipil (Civil Society) dalam Perspektif Gramsci

1. Dikotomi dan Kesatuan Dialektis: Political Society versus Civil Society

Dalam pemikiran Gramsci, negara tidak dapat dipahami secara sempit sebagai entitas yang hanya mengandalkan kekuatan koersif semata. Gramsci membedakan dua level superstruktur yang saling berkaitan, yakni political society dan civil society. Political society merupakan ranah dominasi melalui aparatus koersi seperti hukum, militer, dan birokrasi, sementara civil society adalah ranah konsensus yang meliputi lembaga pendidikan, media, agama, dan organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian terhadap novel Tuter Dedes Doa dan Kutukan, "masyarakat politik di dalamnya terdapat wilayah kekerasan, pemaksaan, dan intervensi. Posisinya dibutuhkan untuk menciptakan sikap patuh massa oleh penguasa dalam pengendalian interest-interest dan kebebasan masyarakat intelektual organik".¹⁸ Pernyataan ini menegaskan bahwa political society berfungsi sebagai instrumen pemaksaan struktural yang memastikan kepatuhan massa terhadap tatanan yang berlaku.

Sementara itu, civil society menjalankan fungsi yang berbeda namun tak kalah penting. Dalam kajian terhadap film Ngeri-Ngeri Sedap, ditegaskan bahwa "negara dapat diartikan sebagai tempat hegemoni dilakukan. Gramsci mengartikan di satu sisi negara sebagai masyarakat politik dan disisi yang lain sebagai masyarakat sipil. Sehingga di realitas nyata masyarakat sipil dan negara adalah sama".¹⁹ Penegasan ini memperlihatkan bahwa dalam

¹⁸ Shorfana and Aswar, "Hegemoni Gramsci Dan Praktik Keagamaan Habaib Di Indonesia The Hegemony Of Gramsci And The Religious Practices Of The Habaib In Indonesia."

¹⁹ Sulthoni Achmad and Ririe Rengganis, "Hegemoni Dalam Film Ngeri-Ngeri Sedap Karya Bene Dion Rajagukguk Kajian Hegemoni Antonio Gramsci," *Jurnal Sapala* 10, no. 1 (2023): hlm. 206-201, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/53902>.

kerangka Gramsci, civil society bukan entitas yang berada di luar negara, melainkan bagian integral dari konstruksi negara itu sendiri, tempat di mana konsensus ideologis direproduksi secara terus-menerus melalui institusi-institusi kultural.

Lebih jauh, Gramsci memperkenalkan konsep *stato integrale* atau negara integral, yakni sintesis organis antara political society dan civil society yang batas-batasnya bersifat cair dan saling meresap. Dalam analisis terhadap kesenian Gandrung di Banyuwangi, relasi ini termanifestasi secara konkret, di mana "hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara".²⁰ Kondisi demikian membuktikan bahwa negara integral dalam pandangan Gramsci beroperasi secara simultan melalui paksaan dan persetujuan. Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui aparatus represif, tetapi juga melalui "penyebarannya dilakukan secara persuasif dengan bentuk hegemoni kebudayaan yang disebar dalam bentuk kepercayaan populer",²¹ sehingga political society dan civil society harus dipahami bukan sebagai dikotomi, melainkan sebagai kesatuan dialektis yang membentuk arsitektur kekuasaan secara menyeluruh dan organis.

Tabel berikut memaparkan perbandingan komprehensif antara *political society* dan *civil society* dalam kerangka pemikiran Gramsci, guna menunjukkan bahwa keduanya bukan entitas yang terpisah melainkan kesatuan dialektis yang bersama-sama membentuk arsitektur kekuasaan hegemonik secara menyeluruh.

Tabel 2. Dikotomi dan Kesatuan Dialektis: *Political Society* versus *Civil Society*

Dimensi Perbandingan	<i>Political Society</i>	<i>Civil Society</i>
Definisi	Ranah dominasi melalui aparatus koersif negara	Ranah konsensus melalui institusi-institusi non-negara
Instrumen Utama	Hukum, militer, polisi, birokrasi	Pendidikan, media, agama, keluarga, organisasi kemasyarakatan
Mekanisme Kekuasaan	<i>Coercion — pemaksaan dan sanksi langsung</i>	<i>Consent — persuasi dan internalisasi nilai secara sukarela</i>

²⁰ Mahfud et al., "Gandrung As A Political Communication Tool In Banyuwangi (A Study Of Antonio Gramsci ' S Hegemony)," *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): hlm.263-274, <https://doi.org/10.36526/js.v7i2.e-ISSN>.

²¹ Firmansyah and Indarti, "Internalisasi Counter Hegemoni Dalam Novel Tutar Dedes Doa Dan Kutukan Karya Amalia Yunus (Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)."

Fungsi Hegemonik	Memastikan kepatuhan massa dan mengendalikan oposisi secara struktural	Mereproduksi ideologi dominan sebagai common sense yang diterima alamiah
Sifat Dominasi	Terbuka, represif, kasat mata	Halus, persuasif, tidak disadari sebagai dominasi
Potensi Transformatif	Terbatas — perubahan melalui pengambilalihan paksa (war of maneuver)	Lebih terbuka — arena counter-hegemony dan war of position
Relasi dengan Negara	Identik dengan negara dalam pengertian sempit	Bagian integral dari stato integrale (negara integral) Gramsci
Aktor Kunci	Aparatur negara, elit birokrasi, aparat keamanan	<i>Organic intellectuals, tokoh agama, aktivis, jurnalis, pendidik</i>

Sumber: Diolah dari Firmansyah & Indarti (2023, hlm. 69); Achmad & Rengganis (2023, hlm. 208); Mahfud dkk. (2023, hlm. 266); Shorfana & Aswar (2025, hlm. 333).

2. Civil Society sebagai Arena Perebutan Hegemony dan Potensi Kontra-Hegemoni

Dalam perspektif Gramsci, *civil society* tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai ruang netral di luar negara, melainkan sebagai arena kontestasi ideologis yang bersifat dialektis. Di satu sisi, *civil society* merupakan medan tempat kelas dominan mereproduksi dan mengonsolidasikan hegemoninya melalui institusi-institusi kultural seperti pendidikan, media, dan agama. Di sisi lain, ruang yang sama menyimpan potensi bagi kelompok *subaltern* untuk membangun kesadaran kritis dan *counter-hegemony*. Dualitas ini tampak jelas dalam analisis novel *Tanah Para Bandit*, di mana institusi pendidikan digambarkan sebagai alat domestikasi ideologis: "Mereka ajari kita menjadi penurut sejak kecil. Hafal rumus, patuh aturan, jangan banyak bertanya".²² Kutipan tersebut memperlihatkan bagaimana *civil society* melalui lembaga pendidikan difungsikan untuk menghasilkan individu yang tidak kritis, sehingga secara tidak langsung melanggengkan dominasi kelas penguasa. Namun demikian, *civil society* juga mengandung potensi perlawanan. Tokoh ketua serikat buruh dalam novel yang sama merepresentasikan intelektual organik yang tumbuh dari kelas tertindas dan menggunakan pengetahuan serta posisinya untuk memperjuangkan kepentingan kelasnya, meskipun pada

²² Jojon, Nurlailatul Qadriani, and Rahman, "Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Tanah Para Bandit Karya Tere Liye," *Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra* 3, no. 3025 (2025): 1hlm. 88-200, <https://doi.org/10.33772/mcmjj706>.

akhirnya menghadapi represi sistematis dari kelompok dominan. Hal ini menegaskan bahwa *counter-hegemony* bukan sekadar kemungkinan abstrak, melainkan praktik nyata yang lahir dari dalam tubuh *civil society* itu sendiri.

Dalam konteks ini, Gramsci membedakan antara strategi *war of position* dan *war of maneuver*. Pada masyarakat Barat yang memiliki *civil society* kuat, perubahan sosial-politik tidak dapat dicapai melalui pengambilalihan kekuasaan negara secara langsung. Sebaliknya, diperlukan perjuangan panjang di ranah ideologi dan budaya terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa hegemoni kekuasaan bekerja melalui "mekanisme ideologis, kultural, dan struktural ketimbang kekerasan fisik semata" (Jojon, Qadriani, & Rahman, 2025, hlm. 199). Analisis serupa juga ditemukan dalam kajian novel *Lingkar Tanah Lingkar Air*, di mana penyebaran ideologi berlangsung melalui lembaga-lembaga sosial dengan kaum intelektual sebagai fungsionarisnya, bukan melalui paksaan langsung.²³ Dengan demikian, *war of position* mensyaratkan penguasaan atas institusi-institusi *civil society* sebagai prasyarat transformasi hegemonik yang berkelanjutan.

D. Implikasi Pemikiran Filsafat Politik Gramsci tentang Hegemony terhadap Relasi Negara dengan Masyarakat Sipil

1. Implikasi Teoretis: Mendekonstruksi Konsepsi Liberal tentang Negara dan Masyarakat Sipil

Salah satu implikasi paling fundamental dari pemikiran filsafat politik Antonio Gramsci adalah kemampuannya menggugat dan mendekonstruksi pandangan liberal klasik yang secara tegas memisahkan negara dan masyarakat sipil sebagai dua entitas yang otonom, bersifat netral, dan berdiri sendiri. Dalam tradisi liberal, masyarakat sipil lazim dipahami sebagai ruang bebas di luar jangkauan kekuasaan negara, yakni arena di mana individu dapat mengekspresikan kepentingan, nilai, dan identitasnya secara mandiri. Namun, Gramsci menolak anggapan ini secara radikal. Bagi Gramsci, "kenetralan" *civil society* bukanlah kondisi alamiah, melainkan sebuah ilusi hegemonik yang diproduksi secara sistematis untuk melegitimasi dominasi kelas penguasa. Hal ini tercermin dalam konsepsinya bahwa negara tidak hanya bekerja melalui aparatus pemaksaan (*political society*), tetapi juga melalui konsensus yang dibangun di dalam institusi-institusi masyarakat sipil itu sendiri. Sebagaimana diuraikan dalam kajian atas film Ali Topan, hegemoni kapitalisme disebarluaskan justru melalui institusi internal seperti

²³ Rostan, Juanda, and Faisal, "Kaum Intelektual Dalam Novel Lingkar Tanah Lingkar Air Karya Ahmad Tohari (Pendekatan Hegemoni Antonio Gramsci)," *NEOLOGIA: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Berada* 1, no. 3 (2020): hlm. 119-126, <https://ojs.unm.ac.id/Neologia/article/view/18896>.

keluarga, sehingga ideologi kelas dominan tertanam secara halus dan diterima sebagai sesuatu yang wajar: "Gramsci berpendapat bahwa hegemoni tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan negara yang represif, tetapi juga melalui lembaga-lembaga dalam masyarakat sipil seperti keluarga, sekolah, dan media, yang bertugas menyebarkan nilai-nilai kelas dominan secara persuasif".²⁴

Implikasi epistemologis dari pemikiran Gramsci ini selanjutnya membuka kerangka analitis baru yang jauh lebih kaya dalam ilmu politik. Kekuasaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai sesuatu yang bekerja melalui instrumen negara yang kasat mata, seperti hukum, polisi, atau militer, melainkan meresap secara diam-diam ke dalam keseharian, nilai-nilai, dan common sense masyarakat. Fenomena ini tampak nyata dalam analisis atas kumpulan cerpen *Corat-coret di Toilet*, di mana hegemoni negara terbukti bekerja melalui berbagai bentuk kepercayaan populer yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat, yakni "suatu hal kolektif dan berdasar pada pengalaman populer yang dianggap wajar, alamiah, dan spontan".²⁵ Dengan kerangka epistemologis semacam ini, agenda riset ilmu politik didorong untuk lebih peka terhadap dimensi ideologis kekuasaan, tidak hanya meneliti kebijakan publik atau struktur institusional formal, tetapi juga mengkaji bagaimana nilai-nilai, narasi budaya, dan praktik keseharian menjadi medan pertarungan hegemoni antara negara dan masyarakat sipil yang sesungguhnya tidak pernah benar-benar terpisah.

2. Implikasi Praktis: Hegemony, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil Kontemporer

Implikasi pemikiran Gramsci tentang hegemoni terhadap relasi negara dengan masyarakat sipil kontemporer dapat dibaca melalui fenomena *shrinking civic space*, yakni penyempitan ruang gerak masyarakat sipil yang semakin masif terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, negara tidak semata-mata menggunakan kekuatan koersif untuk membungkam oposisi, melainkan juga menggunakan mekanisme hegemonik yang lebih halus melalui instrumentalisasi *civil society* itu sendiri. Sebagaimana ditunjukkan dalam analisis pembentukan KUHP berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, proses legislasi tidak bersifat netral, melainkan merupakan arena operasi hegemoni ideologis, di mana "hegemoni ideologis, dalam hal ini, menjadi instrumen utama yang memungkinkan kelompok

²⁴ Masfufatul Islamiyah and Resdianto Permata Raharjo, "Representasi Anarkisme Subkultur Punk Jalanan Melawan Kapitalisme Dalam Film *Ali Topan Karya Sidharta Tata* (Perspektif Hegemoni Antonio Gramsci)," *Jurnal Bapala* 12, no. 2 (2025): Hlm. 376–387.

²⁵ Achmad and Rengganis, "Hegemoni Dalam Film *Ngeri-Ngeri Sedap Karya Bene Dion Rajagukguk* Kajian Hegemoni Antonio Gramsci."

dominan mempertahankan kekuasaannya secara lebih halus dan berkelanjutan".²⁶ Nilai-nilai partikular kelompok dominan dinormalisasi menjadi norma hukum yang tampak universal dan sah, sementara keberagaman nilai dalam masyarakat sipil diabaikan secara sistemik.

Mekanisme hegemonik serupa juga berlangsung dalam relasi antara korporasi multinasional dan negara berkembang. Kasus Freeport-McMoRan di Papua memperlihatkan bagaimana negara dan korporasi bersinergi membangun legitimasi ideologis melalui narasi pembangunan dan program CSR, sehingga "Freeport berperan bukan hanya sebagai aktor ekonomi tetapi juga sebagai representasi hegemoni politik AS di Indonesia".²⁷ Strategi consent building ini secara efektif membuat kelompok yang terdampak menerima struktur eksploitasi sebagai sesuatu yang wajar karena dikaitkan dengan "pembangunan, kemajuan teknologi, dan modernisasi". Di sinilah relevansi analisis Gramscian menjadi sangat tajam: hegemoni tidak bekerja melalui paksaan semata, tetapi melalui internalisasi nilai dominan sebagai common sense yang diterima secara sukarela oleh kelompok subordinat.

Menjawab tantangan ini, perspektif Gramscian menawarkan agenda normatif yang emansipatoris bagi demokratisasi yang substansial. Pertama, penguatan intelektual organik yang genuinly berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada elite kekuasaan. Kedua, pembangunan critical consciousness melalui pendidikan kritis yang mampu mendekonstruksi narasi hegemonik secara sistematis. Ketiga, konstruksi blok historis alternatif sebagai koalisi lintas kelas dan identitas yang menyatukan gerakan kontra-hegemonik. Pentingnya fungsi pedagogis ini ditegaskan bahwa "hukum pidana dalam KUHP tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, mengarahkan, dan menginternalisasi nilai-nilai tertentu dalam kehidupan warga negara",²⁸ yang menunjukkan betapa pentingnya masyarakat sipil memiliki kesadaran kritis untuk melawan internalisasi nilai dominan tersebut. Dalam era digital, perang posisi (war of position) semakin terbuka melalui gerakan kontra-hegemonik berbasis digital, di mana "tekanan masyarakat sipil dan tuntutan keadilan memengaruhi kebijakan negara",²⁹ sebagaimana terbukti dalam perlawanan masyarakat adat Papua yang berhasil mendorong pergeseran kebijakan pengelolaan tambang ke arah yang lebih

²⁶ Rizky Al Ikhsan, Saiful Amin, and Khairul Fahmi, "Hegemoni Hukum Islam Dalam Legislasi KUHP: Analisis Gramscian Atas Undang-Undang NO.1 Tahun 2023," *Al Muhkam Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 1 (2027): hlm.54-66, <https://doi.org/10.65980/almuhkam.v1i1.35>.

²⁷ Alvita Buyung, Jennifer Kantohe, and Angelica Rawis, "Hegemoni Amerika Serikat Dalam Pengelolaan Tambang Di Indonesia: Analisis Tambang Freeport-McMoRan Di Papua," *IPI : Jurnal Inovasi Politik Indonesia* 01, no. 01 (2025): hlm.18-27.

²⁸ Ikhsan, Amin, and Fahmi, "Hegemoni Hukum Islam Dalam Legislasi KUHP: Analisis Gramscian Atas Undang-Undang NO.1 Tahun 2023."

²⁹ Buyung, Kantohe, and Rawis, "Hegemoni Amerika Serikat Dalam Pengelolaan Tambang Di Indonesia: Analisis Tambang Freeport-McMoRan Di Papua."

berkeadilan. Dengan demikian, demokratisasi yang sejati mensyaratkan masyarakat sipil yang kritis, otonom, dan terorganisir sebagai kekuatan hegemonik tandingan yang berkelanjutan dan emansipatoris.

KESIMPULAN

Pemikiran filsafat politik Antonio Gramsci tentang *hegemoni* menawarkan kerangka analitis yang melampaui determinisme ekonomi Marxisme ortodoks dengan menempatkan dimensi kultural dan ideologis sebagai arena utama reproduksi kekuasaan. Gramsci membuktikan bahwa dominasi kelas penguasa tidak semata-mata bekerja melalui koersi aparatus negara (*political society*), melainkan melalui konstruksi konsensus yang halus di dalam institusi-institusi *civil society* seperti pendidikan, media, agama, dan keluarga. Konsep *historic bloc*, *organic intellectuals*, dan dialektika *war of position* versus *war of maneuver* melengkapi pemahaman tentang bagaimana hegemoni dibangun, dipertahankan, dan kemungkinan ditransformasi melalui *counter-hegemony*. Secara implikatif, pemikiran Gramsci mendekonstruksi konsepsi liberal yang memisahkan negara dan masyarakat sipil sebagai entitas otonom, sekaligus membuka agenda emansipatoris bagi demokratisasi substansial melalui penguatan *critical consciousness* masyarakat. Namun, kajian ini memiliki limitasi berupa ketergantungan pada sumber-sumber sekunder berbasis teks sastra dan analisis kebijakan yang bersifat kontekstual, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati terhadap konteks sosial-politik yang lebih beragam.

Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa saran dapat dirumuskan secara akademis maupun praktis. Secara praktis, pemerintah dan organisasi *civil society* perlu mendorong penguatan *critical consciousness* melalui pendidikan transformatif yang mampu mendekonstruksi narasi hegemonik yang telah terinternalisasi sebagai *common sense*. Institusi pendidikan harus diposisikan bukan sebagai alat domestikasi ideologis, melainkan sebagai ruang pembentukan *intelektual organik* yang berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, gerakan sosial perlu membangun *historic bloc* alternatif berbasis koalisi lintas kelas, identitas, dan gerakan digital sebagai *counter-hegemony* yang berkelanjutan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian Gramscian dikembangkan melalui pendekatan *mixed methods* yang menggabungkan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dengan etnografi institusional, guna menangkap dinamika hegemoni secara lebih empiris dan kontekstual. Penelitian komparatif lintas negara tentang *shrinking civic space* dalam perspektif neo-

Gramscian juga sangat relevan untuk memperkaya diskursus demokrasi kontemporer di era *post-truth*.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Sulthoni, and Ririe Rengganis. "Hegemoni Dalam Film Ngeri-Ngeri Sedap Karya Bene Dion Rajagukguk Kajian Hegemoni Antonio Gramsci." *Jurnal Sapala* 10, no. 1 (2023): hlm. 206-201. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/53902>.
- Adlini, Miza, Anisya Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6 (March 1, 2022): hlm.974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Buyung, Alvita, Jennifer Kantohe, and Angelica Rawis. "Hegemoni Amerika Serikat Dalam Pengelolaan Tambang Di Indonesia: Analisis Tambang Freeport-McMoRan Di Papua." *IPI : Jurnal Inovasi Politik Indonesia* 01, no. 01 (2025): hlm.18-27.
- Dani, Fais, and Suseno Suseno. "Hegemoni Gramsci Dalam Novel Kubah Karya Ahmad Tohari." *Jurnal Sastra Indonesia* 12 (July 23, 2023): hlm.127-137. <https://doi.org/10.15294/jsi.v12i2.70403>.
- Firmansyah, Rifky Aldy, and Titik Indarti. "Internalisasi Counter Hegemoni Dalam Novel Tutur Dedes Doa Dan Kutukan Karya Amalia Yunus (Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)." *BAPALA* 10, no. 1 (2023): hlm 59-70. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/53713>.
- Ikhsan, Rizky Al, Saiful Amin, and Khairul Fahmi. "Hegemoni Hukum Islam Dalam Legislasi KUHP: Analisis Gramscian Atas Undang-Undang NO.1 Tahun 2023." *Al Muhkam Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 1 (2027): hlm.54-66. <https://doi.org/10.65980/almuhkam.v1i1.35>.
- Ikhwan, Ali, and Sri Wardani. "Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara Melalui Media Sosial Youtube Di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 4 (May 15, 2022): hlm.33-46. <https://doi.org/10.47650/jglp.v4i1.406>.
- Islamiyah, Masfufatul, and Resdianto Permata Raharjo. "Representasi Anarkisme Subkultur Punk Jalanan Melawan Kapitalisme Dalam Film Ali Topan Karya Sidharta Tata (Perspektif Hegemoni Antonio Gramsci)." *Jurnal Bapala* 12, no. 2 (2025): Hlm. 376–387.
- Jaya, Guntur, Idi Warsah, and Muhammad Istan. "Kiat Penelitian Dengan Model Pendekatan Telaah Kepustakaan." *Tik Ilmeu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 7 (June 30, 2023): hlm.117. <https://doi.org/10.29240/tik.v7i1.6494>.
- Jojon, Nurlailatul Qadriani, and Rahman. "Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel Tanah Para Bandit Karya Tere Liye." *Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra* 3, no. 3025 (2025): 1hlm. 88-200. <https://doi.org/10.33772/mcmjj706>.

- Koch, Max. "State-Civil Society Relations in Gramsci, Poulantzas and Bourdieu: Strategic Implications for the Degrowth Movement." *Ecological Economics* 193 (2022): hlm.107275. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107275>.
- Lin, Yue Zhou. "Gramsci, the Relativity of the Integral State-Society, and the COVID-19 Interregnum." *Critical Sociology* 49, no. 3 (May 1, 2023): hlm.415-435. <https://doi.org/10.1177/08969205221086490>.
- Mahfud, Andrik Purwasito, Warto, and Wakit Abdullah Rais. "Gandrung As A Political Communication Tool In Banyuwangi (A Study Of Antonio Gramsci ' S Hegemony)." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): hlm.263-274. <https://doi.org/10.36526/js.v7i2.e-ISSN>.
- Maulida, Nuzulul Intan. "Praktik Kekuasaan Dalam Novel Ri 1 Karya Salsadila Nurfazriah (Kajian Hegemoni Antonio Gramsci)." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 7 (2025): Hlm.37. <https://doi.org/10.62281/v3i7.2588>.
- Moyo, Zenzo. *Civil Society and the Party-State in Zimbabwe: Democracy, Hegemonies and Polarities*, 2024. <https://doi.org/10.1007/978-981-97-5254-6>.
- Pangestu, Ilham, Suparmin, and Titik Sudiatami. "Hegemoni Kekuasaan Dalam Novel 86 Karya Okky Madasari." *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 19 (December 4, 2025): hlm.261-279. <https://doi.org/10.25134/q2zgb263>.
- Priyanto, Panji Perdana Putra, Ahmad Fatkhur Rohman, and Shinta Nurziana. "Hegemoni Kekuasaan Dalam Pagelaran Wayang Climen Lakon 'Semar Mbangun Kayangan' Oleh Ki Seno Nugroho Perspektif Antonio Gramsci." *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya* 08, no. 02 (2026): hlm.431-441. <https://doi.org/10.30998/rq1e0v55>.
- Rachman, Ayu Tasyah Vaulita, and Haris Supratno. "Perlawanan Kaum Intelektual Terhadap Kekuasaan Dalam Novel Kelomang Karya Qizink La Aziva: Kajian Hegemoni Gramsci." *Jurnal Sapala* 9, no. 2 (2022): hlm 56-67. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/47674>.
- Rahma, Gina, Ahmad Andra, Asfy Putri Aisyah, Nurul Sofwan Adha, Fadhil Ahda, and Moh Wazir Kamil. "Hegemoni Pemerintah Dalam Kebijakan Penghentian Izin Reklamasi Pantai Teluk Utara Jakarta Berdasarkan Teori Antonio Gramsci." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 2 (2024): hlm.7. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.809>.
- Rostan, Juanda, and Faisal. "Kaum Intelektual Dalam Novel Lingkar Tanah Lingkar Air Karya Ahmad Tohari (Pendekatan Hegemoni Antonio Gramsci)." *NEOLOGIA: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia Berada* 1, no. 3 (2020): hlm. 119-126. <https://ojs.unm.ac.id/Neologia/article/view/18896>.
- Sardar, Nayandeep. "Understanding Hegemony : A Critical Analysis through the Lens of Antonio Gramsci." *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)* 6, no. 2 (2024): hlm.1-6. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.15796>.
- Shorfana, Muhammad Rizky, and Aswar. "Hegemoni Gramsci Dan Praktik Keagamaan Habaib Di Indonesia The Hegemony Of Gramsci And The Religious Practices Of The

Habaib In Indonesia.” *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, no. c (2025): hlm.328-341. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v6i2.358>.

Zed, M. “Metode Penelitian Kepustakaan.” In *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, 94, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=zG9sDAAAQBAJ>.